

以下は、講師のバクティアル・ディアントさんご自身による講演内容の要旨紹介（インドネシア語と英語の両方）です。

‘Tanah Harapan’, Pelanggaran HAM, dan Penentuan Nasib Sendiri: Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Papua

Dianto Bachriadi, PhD

Peneliti Agrarian Resources Centre (ARC), Indonesia

Peneliti/Profesor Tamu di CSEAS, Universitas Kyoto, Jepang

Mantan Anggota dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia, 2012-2017

Sejak tanaman kelapa sawit mulai dikenalkan sebagai tanaman perkebunan di Papua pada awal tahun '80-an di daerah Arso, Kabupaten Jayapura, perluasan kebun-kebun sawit skala besar seperti tidak bisa terbendung lagi. Bersamaan dengan ambisi pemerintah untuk mengembangkan sekitar 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia, tanah Papua yang mayoritas masih berupa tutupan hutan tropis merupakan target berikutnya setelah Sumatra dan Kalimantan dipenuhi oleh sawit. Pemerintah Indonesia manargetkan sekitar 4 juta hektar kebun sawit dapat dikembangkan di tanah Papua pada tahun 2020. Peningkatan permintaan CPO untuk beragam industri termasuk biofuel dan kemudahan untuk memperoleh ijin usaha serta lahan membuat Tanah Papua menjadi salah satu target utama perluasan kebun sawit. Hingga akhir 2014 ada sekitar 21 perusahaan perkebunan yang telah membuka lahan dengan ijin untuk membuat perkebunan kelapa sawit. Puluhan perusahaan lainnya telah mengantongi ijin lokasi dari pemerintah daerah setempat dan bersiap untuk turut membuka lahan. Sejak awal pembangunan kebun sawit di awal tahun 1980, mengelabui penduduk setempat untuk melepas tanah-tanah adat mereka menjadi cara utama dari perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai ribuan hektar lahan. Kekerasan-kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya, yang berkelindan dengan pendekatan militerisme yang mulai intensif diterapkan kembali di Papua, kemudian menyertai upaya pembukaan lahan-lahan untuk kebun sawit, apalagi jika warga setempat berupaya untuk menolak atau menuntut hak-haknya. Isu-isu pembangunan berbasis hak, produksi sawit yang berkelanjutan (*sustainable palm oil*), dan kerusakan lingkungan hanya menjadi retorika kebijakan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang berkepentingan dengan bisnis kelapa sawit lebih abai terhadap isu-isu kesejahteraan, kesetaraan, kemanusiaan dan lingkungan tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian, pelanggaran HAM, perampasan kekayaan alam, dan hak menentukan nasib sendiri menjadi beberapa isu pokok bagi gerakan pembebasan papua (*free Papua movement*).

Kata Kunci: perkebunan kelapa sawit, penggusuran tanah adat, pelanggaran HAM, kemiskinan, gerakan Papua Merdeka

The 'Land of Hopes', Human Rights Violation, and the Right to Self-Determination: Development of Palm Oil Plantation in Papua

Dianto Bachriadi, PhD

Researcher at Agrarian Resources Centre (ARC), Indonesia

Visiting Scholar/Professor at CSEAS, Kyoto University, Japan

Former Commissioner and Vice Chair of the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia (KOMNAS HAM), 2012-2017

Since the oil palm was introduced as an estate plant in Papua in the early '80s at Arso region of Jayapura District, expansion of large scale cannot be stopped. Along with the ambition of Indonesian government to develop around 20 million hectares of palm oil estates all over Indonesia, the huge land of Papua, which majority still covered by tropical forests, is becoming the next target after Sumatra and Kalimantan. The government of Indonesia targeted around 4 million hectares of palm oil plantation can be developed in Papua by 2020. The increasing demand of CPO (crude palm oil) for various industries including biofuel and an easiness to get a business permit and land have rendered to make Papua as one of the main targeted areas for this expansion. By the end of 2014, there were 21 plantation companies cleared the Papua's land with a permit to develop palm oil plantations. More other companies already hold location permits from local governments and have prepared to join these land-clearing activities. Since the beginning of this development in the early 1980s, manipulations of the innocence and powerless of local people have been the dominant mechanism to take over control thousand hectares of customary lands. The harshness of dispossession and other human rights violations, which are connected to the re-intensified militarism approach in Papua, are incorporated with land clearing activities, particularly when local people try to defend their land or ask for their rights. The rights-based development, sustainable palm oil production, and environmental degradation issues are only rhetoric in government's policies. Corporations are largely ignorant of those welfare, equality, humanity and environmental issues. This is not surprising that the human rights violation, plundering local's (natural) wealth, and the right to self-determination are becoming significant issues for the free Papua movement.

Keywords: *Palm oil plantation, customary land dispossession, human right violation, poverty, Free Papua movement*